

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Diani Sadiawati, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: YSHK, 2019).
- Douglass C. North, “*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*” (Cambridge University Press, 1990).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy*,” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950).
- Ibnu Sina Chandranegara, *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*, dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia*, (Jember:UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Kementerian PPN/Bappenas, *Background Study Reformasi Regulasi: Tata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019).
- Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 205).
- Lawrence M. Friedman, “*The Legal System: A Social Science Perspective*” (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-undangan Daerah*, (Semarang: UNDIP Press, 2023).
- Makbul, M., *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*, UIN Alauddin, (Makassar: 2021).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Muntoha, “*Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*” (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990).

Song June Kim, 2016, *Regulatory Coherence : The Case of The Republic of Korea*, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) in Gill, D. and P. Intal, Jr. (eds.), *The Development of Regulatory Management Systems in East Asia: Country Studies*. ERIA Research Project Report 2015-4, Jakarta: ERIA.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*” (Bandung: Alfabeta, 2017).

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

B. Makalah, Artikel, dan/atau Jurnal

Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). *Lembaga tunggal pengelola regulasi: dasar pemikiran dan tawaran implementasinya dalam ketatanegaran indonesia*. *Veritas et justitia*, 7(2), 431-458.

Anggono dkk., “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya,”

Ari Wirya Dinanta, 2019, “*Mekanisme Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menggagas Arah*

Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; Jakarta.,

Efriliani, Firial Tiara, dkk., "*The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance*," Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 4, No. 1 (2026).

Herlin Wijayati, Indah Dwi Qurbani, Endrianto Bayu Setiawan, dan Ricardo Simatupang, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 31, No. 3 (2024).

Jongryn Mo, 2010, *The Rule of Law in South Korea*, Hoover Institution Press : Stanford.

Mohamad Iksan Maolana, "*Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda*," Bappenas Working Papers, Vol. 1, No. 1, 2018.

Nara Park, et, al, *Deregulating a Developmental State: Changes Since South Korea 1998 Regulatory Reform*, *Public Administration Quarterly*, Vol. 47, No.4, 2023.

OECD, "*Reviews of Regulatory Reform, Indonesia 2012: Strengthening Co-ordination and Connecting Market*" (OECD Publishing, 2012).

OECD, 2011, *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*, OECD Publishing:Paris.

OECD, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012.

Sholikin, M. N. (2018). *Penataan kelembagaan untuk menjalankan reformasi regulasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8(15), 79-95.

Wicipto Setiadi, "*Simplikasi Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Mendukung Perubahan Berusaha*". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7, Nomor 3 (2018): 322-323

C. Website

M. Dani Pratama Huzaini, *Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus HarmonisasiRegulasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akuikualitas-produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi%0D>.

M. Prawiro, “*Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi*,” Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.

M. Nur Solikhin dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-atas-restrukturisasi-pemecahan-fungsi-kemenkumham-lt6715fc93656c6>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum

Republik Korea, Act No.16322, *Frameworks Act on Administrative Regulations*.

Republik Korea, *Presidential Decree No.29237, Enforcement Decree of the Framework Act on Administrative Regulation*.